

## **BAGAIMANA MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH? (STUDI DI KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT)**

Author:

**Ika Sartika<sup>1\*</sup>**

Affiliasi

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email:

**ika\_sartika@ipdn.ac.id**

### ***Abstract***

*Improving national competitiveness and regional competitiveness is the mandate of the Act as a reference for the government in planning and implementing development. To increase regional competitiveness, regional potential is needed as the basic capital for development. Tasikmalaya City as an autonomous region is a division of Tasikmalaya Regency which was ratified by Law No. 10 of 2001 has abundant potential in various sectors. However, due to various limitations, this potential has not been utilized optimally, so that the competitiveness of Tasikmalaya City is still inferior to Banjar City, Cimahi City, and West Bandung Regency which are much younger. This paper will discuss further how to improve regional competitiveness through the potential of the City of Tasikmalaya. This research was conducted with a qualitative descriptive approach with reference to Porter's diamond model. Data collection techniques in this study were interviews with informants, namely stakeholders in the City of Tasikmalaya, documentation, and observation. There were 17 informants who were successfully interviewed. Qualitative data obtained from interviews and observations were then analyzed by means of tabulation and categorization according to research interests. The next analysis uses an industrial cluster approach so that it is more likely to design a strategy to increase the competitiveness of the City of Tasikmalaya. All tertiary sectors that have very rapid growth in the City of Tasikmalaya then function as core industries, which are further broken down into supplier industries, buyers, supporting industries, related industries, and supporting institutions. With the formation of industrial clusters for tertiary sectors that have high potential, which is equipped with the identification of actors and their respective roles, the increase in the competitiveness of the City of Tasikmalaya will be realized more quickly..*

**Kata kunci:** Daya Saing Daerah; Model Diamond Porter; Klaster Industri; Sektor Tersier.

## **HOW TO INCREASE REGIONAL COMPETITIVENESS? (STUDY IN TASIKMALAYA CITY, WEST JAVA PROVINCE)**

### ***Abstract***

*Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah merupakan amanat Undang-Undang sebagai acuan bagi pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Untuk meningkatkan daya saing daerah diperlukan potensi daerah sebagai modal dasar pembangunan. Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonom merupakan pemekaran dari Kabupaten Tasikmalaya yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 memiliki potensi yang melimpah di berbagai sektor. Namun karena berbagai keterbatasan, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga daya saing Kota Tasikmalaya masih kalah dengan Kota Banjar, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat yang usianya jauh lebih muda. Tulisan ini akan membahas lebih jauh bagaimana meningkatkan daya saing daerah melalui potensi yang dimiliki oleh Kota Tasikmalaya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan acuan model diamond Porter. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan informan yaitu pemangku kepentingan di Kota Tasikmalaya, dokumentasi, serta observasi. Informan yang berhasil diwawancarai sebanyak 17 orang. Data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi selanjutnya dianalisis dengan cara tabulasi dan kategorisasi sesuai kepentingan penelitian. Analisis selanjutnya menggunakan pendekatan kluster industri supaya lebih untuk merancang strategi peningkatan daya saing Kota Tasikmalaya. Semua sektor tersier yang mempunyai pertumbuhan sangat pesat di Kota Tasikmalaya selanjutnya berfungsi sebagai industri inti, yang selanjutnya dirinci ke dalam industri pemasok, pembeli, industri pendukung, industri terkait, serta lembaga pendukung. Dengan terbentuknya kluster industri untuk sektor-sektor tersier yang mempunyai potensi tinggi, yang dilengkapi dengan identifikasi pelaku dan peran masing-masing maka peningkatan daya saing Kota Tasikmalaya akan lebih cepat terwujud.*

**Keywords:** *Regional Competitiveness; Porter's Diamond Model; Industrial Cluster; Tertiary Sectors.*

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks. Pemerintah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur kehidupan warga negaranya. Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan mengemban tiga fungsi hakiki, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 31 ayat (2) e disebutkan bahwa tujuan desentralisasi melalui penataan daerah ialah “*meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah*” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014).

Desentralisasi yang dilaksanakan di Indonesia merupakan upaya untuk meningkatkan geliat pertumbuhan ekonomi di daerah. Kondisi ini membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemakmuran

masyarakatnya melalui inovasi, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas, serta menciptakan tata kelola ekonomi ke arah yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi. Pembentukan daya saing tentu tidak hanya mencakup upaya untuk memperkuat sinergi berbagai sektor pembangunan daerah, tetapi juga mencakup penyempurnaan secara structural dalam sistem pembangunan daerah agar pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara lebih efektif dan efisien.

Era globalisasi menuntut setiap daerah (kabupaten-kota, provinsi) untuk dapat menginventarisasi sekaligus melakukan upaya dalam mengoptimalkan semua sumber daya (resources) yang dimiliki. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan daya saing daerah yang bersangkutan (Fauzi & Raharja, 2017). Pada tahun 2014 World Economic Forum (WEF) melakukan kajian untuk menentukan peringkat daya saing dari 144 negara. Kajian yang dipublikasikan dalam Global Competitiveness Report tersebut menempatkan Indonesia pada posisi ke-34, naik empat peringkat dari kajian tahun sebelumnya. Meski meningkat, posisi Indonesia masih berada di bawah negara-negara asia tenggara lain seperti Singapura yang berada di urutan ke-2, Malaysia di urutan ke-20, bahkan Thailand di peringkat ke-31 Berdasarkan kajian tersebut tentu Indonesia masih harus terus berbenah untuk mampu terus bersaing. Daya saing tidak hanya berorientasi pada indikator ekonomi, tetapi juga kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Selanjutnya, terkait dengan posisi daya saing Indonesia, *World Economic Forum* pada publikasi Global Competitiveness Report 2016-2017 melaporkan bahwa daya saing Indonesia kembali melemah. Posisi daya saing Indonesia berada pada peringkat ke-41 dari 138 negara yang disurvei. WEF mencatat posisi Indonesia turun empat tingkat dibandingkan hasil pemeringkatan tahun sebelumnya sebelumnya dan posisi ini terus mengalami penurunan sejak 2014. Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, daya saing Indonesia berada di bawah Singapura (urutan ke-2), Jepang (ke-8), Hong Kong (ke-9), Malaysia (ke-25), Korea Selatan (ke-26) dan Thailand (ke-34). Untuk meningkatkan daya saing nasional tidak lepas dari daya saing daerah. Oleh sebab itu, daerah harus mampu meningkatkan daya saing daerah melalui potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Kemampuan mengidentifikasi potensi dan daya saing daerah mutlak diperlukan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan di daerah sebagai pijakan dalam menyediakan kebijakan dasar yang diperlukan bagi pembangunan daerah. Pembangunan sarana dan prasarana, investasi dan akses terhadap sumber dana, kebijakan lingkungan, pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) serta pengembangan sumber daya manusia sudah seharusnya didasarkan pada keperluan untuk mengatasi gap daya saing yang masih dialami di berbagai daerah (Puspita et al., 2017). Pada penelitian ini terdapat sebelas kriteria untuk mengukur daya saing, yaitu: (1) kondisi geografis, (2) tenaga kerja, (3) pendidikan dan kesehatan, (4) institusi, (5) keadaan perekonomian, (6) politik, (7) suku bunga, (8) infrastruktur, (9) listrik dan air bersih, (10) transportasi, dan (11) komunikasi.

Jika pemerintah menginginkan daerahnya berdaya saing, maka program pembangunannya harus berasal dari pengembangan potensi ekonomi unggulannya (Putri & Rahayu, 2021). Ketika berbicara daya saing daerah, tentu tidak terlepas dari membahas sektor unggulan. Sektor unggulan merupakan kunci daerah dalam berdaya saing. Secara umum, dapat dikatakan bahwa daerah yang berdaya saing adalah daerah yang memiliki sektor unggulan (Swastuti & Pudjiarti, 2020). Daya saing daerah merupakan indikator pembangunan yang dapat ditempuh dengan inovasi, inovasi dalam prosesnya membutuhkan komitmen yang berbentuk kebijakan, hal inilah yang membedakan perkembangan pembangunan antar wilayah. (Prasetyo, 2020) Membahas daya saing daerah tentu perlu merujuk pada daya saing internasional. Daya saing ekonomi lokal sendiri terbentuk karena peranan dan komitmen multiaktor di dalamnya yang membentuk suatu format kelembagaan lokal untuk menghilangkan hambatan birokratif bagi pengembangan industri/perusahaan– perusahaan lokal, memperbaiki kegagalan pasar, dan menciptakan keunggulan lokalitas dengan spesialisasi produk yang berciri khas/unik. Kekhasan produksi suatu lokalitas dalam proses perkembangannya terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi kreatif di dalamnya (Swastuti & Pudjiarti, 2020).

Daya saing daerah berkorelasi dengan pembangunan hukum nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang- undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang sebelumnya tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Teori hukum pembangunan generasi kedua melalui konsep hukum tidak hanya sebagai sarana pembangunan, tetapi juga sebagai sarana pembaharuan birokrasi. Pembangunan hukum yang akan meningkatkan daya saing bangsa perlu memperhatikan tiga hal penting, pertama, pembangunan peraturan perundangundangan yang berkualitas dan bermanfaat. Mewujudkan daya saing setiap daerah di Indonesia yang tentunya akan berdampak pada kesejahteraan Negara tentu harus diiringi oleh pembangunan hukum baik secara substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum (Rahayu, 2019).

Kemampuan Daerah untuk meningkatkan daya saingnya akan sangat tergantung pada kemampuan Daerah dalam menemukan dan menentukan faktor-faktor pendorong daya saing dan juga kemampuan Daerah dalam menetapkan kebijakan ekonomi yang difokuskan untuk dapat mendorong transformasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi regional (Ridwan et al., 2018). Daerah yang memiliki daya saing yang tinggi secara umum didominasi oleh Provinsi yang memiliki basis ekonomi yang bersumber pada kekayaan sumber daya alam dan/atau daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi berbasis sektor industri dan sektor jasa. Sedangkan Provinsi yang memiliki posisi daya saing relatif rendah umumnya merupakan daerah dengan basis ekonomi yang bersandar pada sektor primer (khususnya pertanian).

Berbagai upaya sudah dilakukan beberapa daerah untuk meningkatkan daya saingnya, seperti yang ditulis oleh Wibowo (2017), yaitu melakukan Perancangan Branding Desa Wisata Kembang Arum untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah di Bidang Pariwisata. Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam pembangunan daerah kabupaten/kota berkelanjutan (Sulistiwanto,

2017). Penelitian ini mencoba mengklasifikasikan daya saing daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu Daya Saing Daerah dan Kinerja Ekonomi. Analisis tipologi kinerja ekonomi dengan daya saing dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja ekonomi dengan daya saing sehingga dapat dibuat menjadi empat kuadran yaitu: kategori I (Kinerja Ekonomi dan Daya Saing Tinggi); kategori II (Kinerja Ekonomi Tinggi tetapi Daya Saing Rendah); kategori III (Kinerja Ekonomi Rendah Tetapi daya Saing Tinggi); dan kategori IV (Kinerja Ekonomi dan Daya Saing Rendah).

Menurut Parjaman et al. (2019) upaya penguatan kapasitas aparatur daerah untuk saat ini menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, mengingat perkembangan era industry global akan memaksa organisasi sektor publik baik di tingkat pusat maupun di daerah dipaksa untuk mengadaptasikan dirinya dengan kondisi saat ini maupun mendatang. Pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya akan saling bersaing dalam mendapatkan dan mengelola berbagai sumber daya yang semakin terbatas. Daya saing daerah juga dapat diklasifikasikan berdasarkan dua indikator utama, yaitu Daya Saing Daerah dan Kinerja Ekonomi. (Sulistiwanto, 2017)

Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonom merupakan pemekaran dari Kabupaten Tasikmalaya yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 yang terdiri atas 8 (delapan) kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 15 dan desa sebanyak 54 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, 2001). Tetapi dalam perjalanannya melalui Perda No. 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, desa-desa di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya berubah statusnya menjadi kelurahan, sehingga jumlah kelurahan menjadi sebanyak 69 kelurahan, sedangkan untuk kecamatan bertambah menjadi 10 kecamatan, yaitu: [Bungursari](#), [Cibeureum](#), [Cihideung](#), [Cipedes](#), [Indihiang](#), [Kawalu](#), [Mangkubumi](#), [Purbaratu](#), [Tamansari](#), serta [Tawang](#). Banyak potensi yang tersebar di setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya.

Perkembangan ekonomi serta potensi yang dimiliki oleh Kota Tasikmalaya sudah tidak diragukan lagi dan merupakan modal dasar yang sangat kuat untuk investor lokal mau pun asing. Namun hal ini perlu dibarengi dengan usaha yang keras dari pemerintah kota, mengingat persaingan kota semakin ketat. Data yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri (2011) mengenai daya saing daerah untuk 8 (delapan) daerah otonom baru di Provinsi Jawa Barat, memperlihatkan bahwa daya saing Kota Tasikmalaya masih kalah dengan Kota Banjar, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Tulisan ini akan membahas lebih jauh bagaimana meningkatkan daya saing daerah melalui potensi yang dimiliki oleh Kota Tasikmalaya?

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian. Lingkup operasional penelitian ini difokuskan pada lima hal untuk melihat daya saing Kota Tasikmalaya, yaitu:

### **Tabel 1 Lingkup Operasional Penelitian**

<b>Konsep</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>
Daya Saing Kota Tasikmalaya	<i>Factor Conditions</i>	a. Kelembagaan b. Sosial Politik c. Ekonomi Daerah d. Tenaga Kerja dan Produktivitas
	<i>Demand Conditions</i>	a. Tersedianya pasar domestik b. Kemampuan untuk menjual produk a. Permintaan barang dan jasa berkualitas
	<i>Related and Supporting Industries</i>	a. Klaster industri a. Kekuatan pasar
	<i>Firm Strategy, Structure, and Rivalry</i>	a. Strategi b. Struktur a. Persaingan
	<i>Government Roles and Chance</i>	a. Subsidi b. Perpajakan c. Pendidikan d. Penguatan <i>factor conditions</i> a. Standar industri

Sumber: (Porter, 1990)

Berdasarkan pada data yang diperlukan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara yang dilakukan terhadap informan untuk memperoleh gambaran tentang daya saing Kota Tasikmalaya. Informan yang berhasil terjaring dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2 Jenis Informan

<b>No.</b>	<b>Informan</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3
2.	Badan Penanamam Modal dan Pelayanan Izin Terpadu	2
3.	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	2
4.	Pengusaha (Bordir, Properti, Kuliner, Mendong, Batik, Alas Kaki)	10
<b>Jumlah</b>		17

- b. Dokumentasi; dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian seperti: hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang daya saing daerah, data historis, gambar, peta, peraturan, serta tulisan-tulisan dalam media yang relevan dan terkait dengan topik penelitian.

- c. Observasi; peneliti melibatkan diri dengan kegiatan yang sedang diamati, seperti dalam kegiatan-kegiatan investasi di Kota Tasikmalaya. Dengan observasi seperti ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sesuai dengan kenyataan. Di samping itu untuk melihat potensi lain yang mendukung daya saing daerah di Kota Tasikmalaya diperlukan observasi yang cukup teliti.

Data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi selanjutnya dianalisis dengan cara tabulasi dan kategorisasi sesuai kepentingan penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini, daya saing daerah dielaborasi berdasarkan model *diamond* yang dikembangkan oleh Michael Porter dengan sedikit modifikasi. Secara rinci, peningkatan daya saing akan melibatkan aspek-aspek: *factor conditions, demand conditions, related and supporting industries, firm strategy, structure, and rivalry*, serta *government roles and chance* (Porter, 1990).

*Factor Conditions* terdiri atas aspek-aspek: Kelembagaan, Sosial Politik, Ekonomi Daerah, Tenaga Kerja dan Produktivitas, serta Infrastruktur Fisik. Berdasarkan hasil pengolahan data sekunder, wawancara, serta observasi dapat disimpulkan bahwa ekonomi daerah merupakan determinan paling kuat untuk daya tarik investasi di Kota Tasikmalaya. Artinya, para pengusaha akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Kota Tasikmalaya jika kondisi ekonomi daerahnya menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Melihat data *time series* kondisi ekonomi daerah di Kota Tasikmalaya terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Tasikmalaya naik terus. Indikatornya adalah PDRB, pendapatan per kapita, serta Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor tersier. Jika dilihat lebih rinci per kategori, maka terlihat bahwa kategori informasi dan komunikasi adalah kategori jasa yang tumbuh dari tahun ke tahun. Dari data seperti ini sudah dapat diprediksi bahwa para pengusaha akan menanamkan modalnya di sektor jasa informasi dan komunikasi.

Untuk kemudahan investasi di sektor jasa informasi dan komunikasi, maka aspek-aspek lain harus disiapkan untuk mendukung kelancaran investasi. Dari aspek kelembagaan yang perlu disiapkan adalah: payung hukum terkait kemudahan investasi, peraturan-peraturan terkait jenis usaha yang diijinkan, peningkatan kapasitas aparatur supaya bisa mengimbangi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta struktur keuangan daerah yang berpihak pada keberlangsungan investasi.

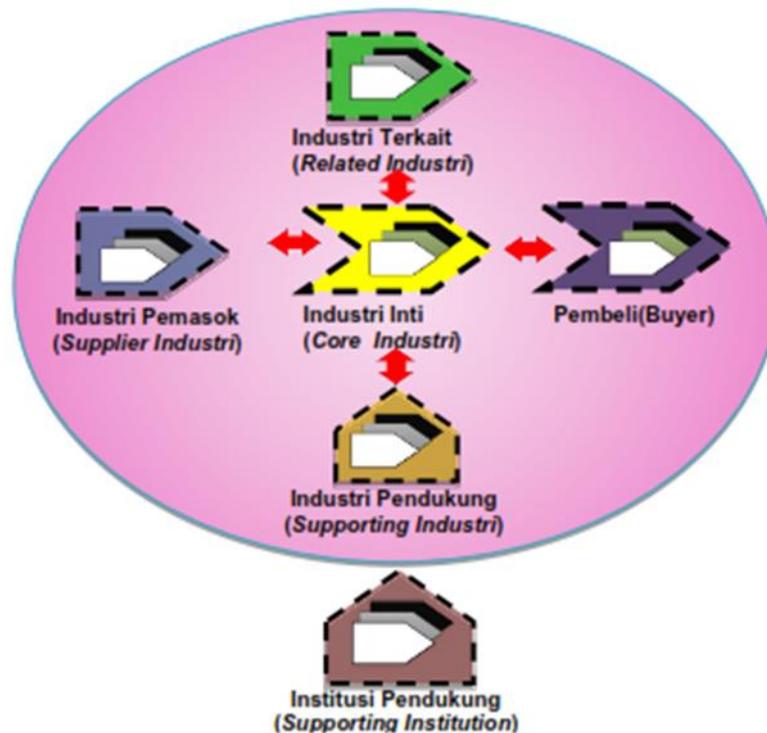
Sektor lain yang memiliki pertumbuhan tinggi adalah kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, kategori Jasa Pendidikan, kategori Konstruksi, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta kategori Jasa Keuangan dan Asuransi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, memungkinkan semua jenis usaha di atas memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam operasional usahanya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mulai dari administrasi, produksi, keuangan, serta pemasaran.

Penentu daya saing berikutnya adalah *Demand Conditions*, yang terdiri atas: tersedianya pasar domestik, kemampuan untuk menjual produk, serta permintaan barang dan jasa berkualitas. Pasar domestik untuk semua usaha di Kota Tasikmalaya tersedia dengan cukup. Hal ini terbukti dari daya beli masyarakat yang meningkat, artinya masyarakat mampu untuk membeli produk dan jasa yang ditawarkan oleh para pengusaha. Kemampuan untuk menjual produk di semua sektor juga cukup bagus. Hal ini terbukti dengan tumbuhnya sektor tersier yang mendominasi sektor primer dan sekunder. Dalam hal ini terbukti bahwa usaha jasa lebih berkembang dibanding usaha produksi. Jasa kaitannya erat dengan kemampuan menjual produk, bukan hanya membuat produk. Permintaan barang dan jasa yang berkualitas erat kaitannya dengan daya beli juga. Ketika daya beli masyarakat tinggi, maka permintaan akan produk dan jasa yang berkualitas juga semakin tinggi. Saat ini kualitas sudah tidak bisa ditawarkan lagi, karena konsumen mempunyai pilihan lain, bahkan dari luar daerah sekali pun. Apalagi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat memungkinkan terjadinya transaksi *online* tanpa dibatasi oleh tempat dengan harga yang kompetitif. Inti dari uraian ini adalah dari sisi permintaan (*demand conditions*) di Kota Tasikmalaya cukup mendukung untuk peningkatan daya saing Kota Tasikmalaya.

Penentu daya saing berikutnya adalah *Related and Supporting Industries* yang dirinci menjadi klaster industri dan kekuatan pasar. Konsep klaster industri berawal dari pandangan Porter tentang adanya faktor-faktor pembentuk industri yang saling berinteraksi. Menurut Porter, daya saing dibentuk oleh interaksi dari beberapa faktor yang disebut sebagai faktor “*diamond*” yang dibentuk oleh (1) *factor conditions*, (2) *demand conditions*, (3) *related and supporting industries*, dan (4) *firm strategy, structure and rivalry*. Dia juga memasukkan dua faktor konteks yang berhubungan secara tidak langsung melalui: (1) *role of chance* dan (2) *role of government*. Faktor-faktor ini secara dinamik mempengaruhi posisi daya saing perusahaan dalam suatu negara.

Pengembangan klaster industri dapat digunakan untuk mengembangkan industri yang bersifat luas (*broad base*) dan terfokus pada jenis-jenis produk yang berpeluang memiliki daya saing internasional yang tinggi di pasar domestik dan global. Lingkup geografis klaster industri dapat sangat bervariasi, terentang dari satu desa saja atau salah satu jalan di daerah perkotaan sampai mencakup sebuah kecamatan, kabupaten, atau provinsi. Sebuah klaster industri dapat juga melampaui batas negara menjangkau beberapa negara tetangga.

Klaster industri pada dasarnya bukan konsep yang sama sekali baru. Namun sejalan dengan perkembangan jaman, telaah konsep/teori dari pengalaman empiris berbagai pihak berkembang dari waktu ke waktu. Beragam definisi dan konsep tentang klaster industri dapat dijumpai dalam berbagai literatur. Definisi klaster industri secara ringkas adalah: “Klaster industri merupakan kelompok usaha spesifik yang dihubungkan oleh jaringan mata rantai proses penciptaan/peningkatan nilai tambah, baik melalui hubungan bisnis maupun non bisnis. Secara skema, pendekatan klaster industri dapat dilihat pada gambar berikut.



Model Generik Klaster Industri (Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi, 2011)

Para pelaku (*stakeholders*) dalam suatu klaster biasanya dikelompokkan dalam industri inti, industri pemasok, industri pendukung, industri terkait, dan pembeli, serta institusi pendukung (“non industri”). Istilah inti, pendukung dan terkait menunjukkan peran pelaku dalam klaster industri tertentu dan tidak ada hubungan dengan tingkat kepentingan para pelaku. Peran tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja tergantung pada tingkat ekonomis dari hubungan rantai nilai tertentu.

Beberapa pengertian elemen-elemen dalam klaster industri antara lain sebagai berikut:

(1) Industri Inti

- Industri yang merupakan fokus perhatian atau tematik dan biasanya dijadikan titik masuk kajian
- Dapat merupakan sentra industri
- Industri yang maju (dicirikan dengan inovasi)

(2) Industri Pemasok

- Industri yang memasok dengan produk khusus
- Pemasok yang khusus (spesialis) merupakan pendukung kemajuan klaster industri

Yang dipasok antara lain:

- Bahan baku utama
- Bahan pendukung

- Aksesori
- (3) Pembeli; antara lain terdiri atas:
- Distributor
  - Pengecer
  - Pemakai langsung
- (4) Industri Pendukung; meliputi industri jasa dan barang, termasuk layanan pembiayaan (Bank, Modal Ventura). Industri pendukung ini antara lain:
- Pembiayaan (Bank, Modal Ventura);
  - Jasa (Angkutan, Bisnis Distribusi, Konsultan Bisnis);
  - Infrastruktur (Jalan Raya, Telekomunikasi, Listrik)
  - Peralatan (Permesinan, Alat Bantu)
  - Pengemasan
  - Penyedia Jasa Pengembangan Bisnis (*Business Development Service Provider/BDSP*)
- (5) Industri Terkait
- Industri yang menggunakan infrastruktur yang sama
  - Industri yang menggunakan sumber daya dan sumber yang sama (misal kelompok tenaga ahli)
- Istilah “terkait” di sini agak berbeda dengan yang dipakai sehari-hari. Industri terkait tidak berhubungan bisnis secara langsung, biasanya meliputi:
- Kompetitor
  - Komplementer
  - Substitusi
- (6) Lembaga Pendukung
- Lembaga pemerintah, yang berupa penentu kebijakan atau melaksanakan peran publik.
  - Asosiasi profesi yang bekerja untuk kepentingan anggota
  - Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat yang bekerja pada bidang khusus yang mendukung

Istilah kluster industri memiliki pengertian lebih luas dari “sentra industri” yang telah dikenal secara umum. Sentra industri lebih merupakan pengelompokan aktivitas bisnis yang serupa di suatu lokasi. Satu atau beberapa sentra industri bisa merupakan bagian integral dan sebagai “titik masuk (*entry point*)” dari upaya pengembangan (penguatan) kluster industri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa semua sektor tersier yang mempunyai pertumbuhan sangat pesat di Kota Tasikmalaya selanjutnya berfungsi sebagai industri inti, dan harus dirinci ke dalam industri pemasok, pembeli, industri pendukung, industri terkait, serta lembaga pendukung. Pembeli terkait juga dengan daya beli masyarakat sekitar atau kekuatan pasar yang ada di luar Kota Tasikmalaya. Jadi, yang perlu diidentifikasi tidak hanya kekuatan industri pemasok dan pendukung,

tetapi juga kekuatan pasar, serta seberapa kuat pesaing yang bermain dalam usaha yang sama. Apa yang harus dilakukan secara rinci termasuk dalam strategi perusahaan yang akan dijabarkan pada bagian selanjutnya.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, maka pada bagian ini akan dibahas hal-hal yang terkait dengan strategi, struktur, serta persaingan. Artinya, semua sektor tersier yang sedang tumbuh di atas perlu merumuskan strategi usahanya supaya bisa berkembang terus dan tidak merugi. Strategi yang dirumuskan paling tidak harus memperhatikan faktor-faktor internal, seperti kekuatan dan kelemahan, serta faktor-faktor eksternal yang meliputi peluang dan ancaman. Selain itu, semua sektor harus mempunyai struktur yang efisien dan kompetitif. Hal ini terkait dengan persaingan yang akan dihadapi dalam pengembangan usahanya. Yang dimaksud struktur ini termasuk struktur organisasi, pegawai, manajemen, struktur gaji, termasuk juga pengembangan terkait dengan inovasi yang secara terus menerus dikembangkan.

Semua hal di atas tidak akan efektif tanpa peran pemerintah daerah dalam memberikan kesempatan bagi para pengusaha untuk menanamkan modalnya di Kota Tasikmalaya. Kesempatan yang diberikan melalui penguatan *factor conditions*, seperti: kemudahan izin yang dikeluarkan melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, kesiapan aparatur untuk melayani, kondisi sosial yang kondusif, struktur keuangan yang berpihak pada investasi, tenaga kerja siap pakai yang melimpah, serta infrastruktur fisik yang mendukung untuk kelancaran usaha.

Peran pemerintah lainnya yang tidak kalah penting adalah pemberian subsidi, terutama ketika sektor-sektor usaha membutuhkan tambahan modal untuk akselerasi usahanya. Dalam hal ini, Kota Tasikmalaya sudah lebih siap dilihat dari struktur belanja daerah yang lebih banyak belanja modal serta belanja barang. Artinya, keuangan daerah lebih mendukung pada investasi. Di samping itu, penetapan pajak usaha yang diberlakukan dengan konsisten sangat diperlukan untuk kontribusi para pengusaha kepada daerah, dalam hal ini Kota Tasikmalaya. Tarif pajak serta mekanisme pemungutan harus disosialisasikan kepada para pengusaha supaya tidak ada alasan mereka tidak mau bayar. Hal lain yang tidak kalah penting terkait dengan standar industri, yang meliputi standar proses produksi, standar produk, standar upah, serta standar lingkungan. Penetapan standar harus dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.

Dalam jangka panjang, Pemerintah Kota Tasikmalaya harus mulai merumuskan *road map* pendidikan yang mendukung pengembangan investasi daerah. Kurikulum pendidikan mulai diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja, sehingga *link and match*nya sudah terlihat dari awal. Melalui pendidikan yang sesuai maka diharapkan pasar tenaga kerja yang berkualitas akan tersedia untuk mendukung perkembangan investasi di Kota Tasikmalaya. Semua ini dapat terwujud jika peran pemerintah daerah betul-betul mendukung dan serius dalam menyiapkan *grand design* lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. Sekali pun *grand design* pendidikan adalah wewenang pemerintah pusat, tetapi paling tidak pemerintah daerah bisa berperan dalam merumuskan muatan lokal pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Peluang lain dapat diwujudkan

melalui pendidikan informal, seperti kursus atau pelatihan yang bersertifikat, sehingga tenaga kerja yang berkualitas dan siap pakai dapat tersedia dengan melimpah.

## **SIMPULAN**

Peningkatan daya saing Kota Tasikmalaya dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Menciptakan klaster industri untuk setiap sektor yang mempunyai pertumbuhan tinggi di Kota Tasikmalaya,
- Mengidentifikasi pelaku (*stakeholders*) dalam setiap klaster,
- Mengidentifikasi peran setiap *stakeholders*,
- Menyiapkan payung hukum terkait: kemudahan izin usaha, pajak, standarisasi (upah, produk, organisasi).
- Memperkuat lembaga Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan aparatur-aparatur yang handal dan siap melayani,
- Menciptakan iklim kompetisi yang sehat melalui peraturan yang diimplementasikan secara konsisten,
- Menjaga situasi yang aman sehingga investor semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di Kota Tasikmalaya,
- Meningkatkan kualitas infrastruktur fisik untuk mendukung kelancaran usaha di Kota Tasikmalaya,
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan formal dan informal sehingga siap untuk berkontribusi dan berkiprah dalam dunia usaha.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fauzi, P., & Raharja, M. C. (2017). Identifikasi dan Klasifikasi Faktor Input Sebagai Variabel Pembentuk Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 127–138.
- Parjaman, T., Soedarmo, U. R., & Enas. (2019). Penguatan Kapasitas Aparatur Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Global. *Journal of Management Review*, 1(Special Issue), 29–42.

- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*.
- Prasetyo, A. (2020). Komparasi Proses Inovasi Dalam Perspektif Kebijakan Pemerintah Daerah dan Daya Saing Daerah. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers, March 2020*, 308–325.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, 1 (2001).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 1 (2014). <https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf>
- Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi. (2011). *Panduan Pengembangan Kluster Industri*. Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT).
- Puspita, C. W., Rachmawati, F., & Sumarsono, H. (2017). Strategi Peningkatan Daya Saing Daerah Wilayah Pengembangan Satu Kabupaten Malang. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 2(3), 392–399.
- Putri, O. H., & Rahayu, S. (2021). Analisis Pengembangan Ekonomi Lokal Untuk Menguatkan Daya Saing Daerah. *Jurnal Akrab Juara*, 6(4), 147–153.
- Rahayu, D. A. (2019). Pembangunan Hukum Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), 1–8. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.3181>
- Ridwan, Hasanuddin, B., Amri, M., & Madris. (2018). *Analisis Daya Saing Daerah di Indonesias*.
- Sulistiwanto, M. S. W. (2017). Tipologi Daya Saing Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Seminar Nasional Dan Gelar Produk SENASPRO 2017, 17-18 Oktober 2017*, 981–985.
- Swastuti, E., & Pudjiarti, E. S. (2020). Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Mendukung Daya Saing Daerah Kota Tangerang. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(1), 25–40.
- Wibowo. (2017). Rebranding Desa Wisata Kembang Arum Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah di Bidang Pariwisata. *Jurnal Dekade*, 10(1), 61–72.